

ABSTRAK

Gracia Feby Yeski Sitepu. NIM. 3213311045 “Partisipasi Masyarakat Desa Bekiung Sebagai Kontrol Sosial Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004”. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan masyarakat sebagai kontrol sosial di Desa Bekiung dalam proses pengelolaan dana desa sebagaimana diamanatkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024 serta menganalisis akses informasi yang diterima oleh masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa di Desa Bekiung sebagaimana diamanatkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan Perundang-undangan. Sementara metode yang digunakan yaitu metode deksriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari observasi serta wawancara dengan narasumber. Sementara itu, data sekunder didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, literatur, jurnal, dan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data dilakukan dengan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat Desa Bekiung dalam pengelolaan dana desa belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan dana desa, adanya prioritas pribadi yang membuat masyarakat lebih mengutamakan kepentingan individu dibandingkan kepentingan bersama, serta penyampaian informasi yang belum merata dari pemerintah desa. Partisipasi masyarakat juga lebih menonjol pada tahap pelaksanaan pembangunan yang didominasi oleh laki-laki, karena diutamakan sebagai pekerja dan diberikan upah. Informasi mengenai pengelolaan dana desa yang diterima masyarakat Desa Bekiung masih terbatas, khususnya untuk kegiatan non-fisik. Meskipun transparansi pembangunan fisik telah diupayakan melalui pemasangan plang/papan informasi, penyebaran informasi secara menyeluruh masih belum didapatkan oleh masyarakat Desa Bekiung.

Kata Kunci : *Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa, UU No. 3 Tahun 2024 Pasal 68 ayat (1).*

ABSTRACT

Gracia Feby Yeski Sitepu. NIM. 3213311045. "Community Participation in Bekiung Village as Social Control in Village Fund Management Based on Article 68 Paragraph (1) of Law No. 3 of 2024." Department of Civic Education, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Medan.

This study aims to analyze the involvement of the community as a form of social control in the management of village funds in Bekiung Village, as mandated by Article 68 Paragraph (1) of Law No. 3 of 2024. It also examines the extent of information access received by the village community regarding the management of village funds. The research employs a normative-empirical legal approach using both conceptual and statutory approaches. The method used is descriptive qualitative. The data collected includes both primary and secondary data. Primary data was obtained through direct observation and interviews with relevant informants, while secondary data was gathered from books, literature, journals, and other sources. Data collection techniques involved observation, interviews, and documentation. Data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings reveal that community participation in the management of village funds in Bekiung Village is not yet optimal. Several factors contribute to this, including a lack of public understanding regarding village fund management, individual priorities that outweigh collective interests, and uneven dissemination of information by the village government. Community participation tends to be more prominent during the implementation stage of development, which is largely dominated by men, as they are prioritized as workers and receive wages. Information received by the Bekiung Village community regarding village fund management remains limited, especially for non-physical activities. Although transparency in physical development has been promoted through the installation of information boards, comprehensive information dissemination has yet to be achieved.

Keywords: Community Participation, Village Fund Management, Law No. 3 of 2024 Article 68 Paragraph (1)